

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Lingkungan yang sehat serta bersih merupakan kondisi yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup di bumi termasuk manusia karena manusia merupakan makhluk hidup yang sangat bergantung pada lingkungan (Haerudin, 2013: 1), sehingga perlu untuk senantiasa dijaga kelestariannya. Namun yang terjadi saat ini adalah bahwa kondisi bumi cenderung memprihatinkan. Kerusakan lingkungan terjadi di hampir seluruh dunia dan selanjutnya akan memberi dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia (United Nations Environmental Programme, n.d., 2016). Kondisi ini terjadi karena manusia seringkali merasa *superior* dan berfikir bahwa alam tidak akan habis sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran manusia akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup (Karim, 2018: 310)

Pertumbuhan penduduk dunia yang sangat cepat akan selalu berbanding lurus dengan jumlah kerusakan lingkungan, tidak terkecuali permasalahan persampahan. Seperti dikutip dari Kaushal dkk. (dalam Prajati, 2015: 40), pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah akan selalu diiringi dengan peningkatan jumlah sampah di wilayah tersebut. Sampah dapat diartikan sebagai sisa aktivitas manusia atau alam dalam bentuk padat.

Berdasarkan data World Bank (2019) dalam artikel “*Solid Waste Management*”, hingga tahun 2016 jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh negara di dunia mencapai 2.01 miliar ton per tahun dan diperkirakan akan mencapai 3.40 miliar ton pada tahun 2050 dengan sebanyak 44% merupakan sampah plastik. Dari sekian banyak sampah tersebut sebanyak 79% sampah langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir, 12% dibakar, dan hanya 9% sampah yang didaur ulang (*Greenpeace Indonesia*, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di dunia masih tergolong buruk, tidak terkecuali di Indonesia.

Seperti dikutip dari artikel “*Indonesia Stands at the Crossroads of a Waste Crisis and Plastic Problem*” (Paulo, 2020), Indonesia menjadi negara dengan jumlah sampah terbesar kedua setelah China. Indonesia sendiri menghasilkan hingga 64 juta ton sampah per tahun yang didominasi oleh sampah organik yakni sebesar 50% dan sampah plastik sebesar 15% (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). Kondisi ini diperparah dengan buruknya sistem pengelolaan sampah di Indonesia (Aqil, 2020 dalam *www.jakartapost*, 10 Mei 2020). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi faktor penyebab peningkatan jumlah sampah dari waktu ke waktu.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elamin (2018: 369) ditemukan bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan penambahan jumlah sampah di Indonesia yakni kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang masih rendah.

Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik dalam Statistisik Lingkungan Hidup Indonesia (2018: 16) tercatat hanya 8,7 persen rumah tangga yang selalu membawa tas belanja sendiri sementara 54,8 persen lainnya tidak pernah membawa tas belanja sendiri. Selain itu terdapat sekitar 66,8 persen sampah rumah tangga yang dibakar dan hanya sebanyak 1,2 persen yang didaur ulang (Badan Pusat Statistik, 2018). Budaya ini menunjukkan bahwa kesadaran rumah tangga akan pentingnya pengurangan serta daur ulang sampah masih tergolong rendah, sehingga diperlukan adanya manajemen dan regulasi yang tepat dalam upaya pengurangan serta pengelolaan sampah.

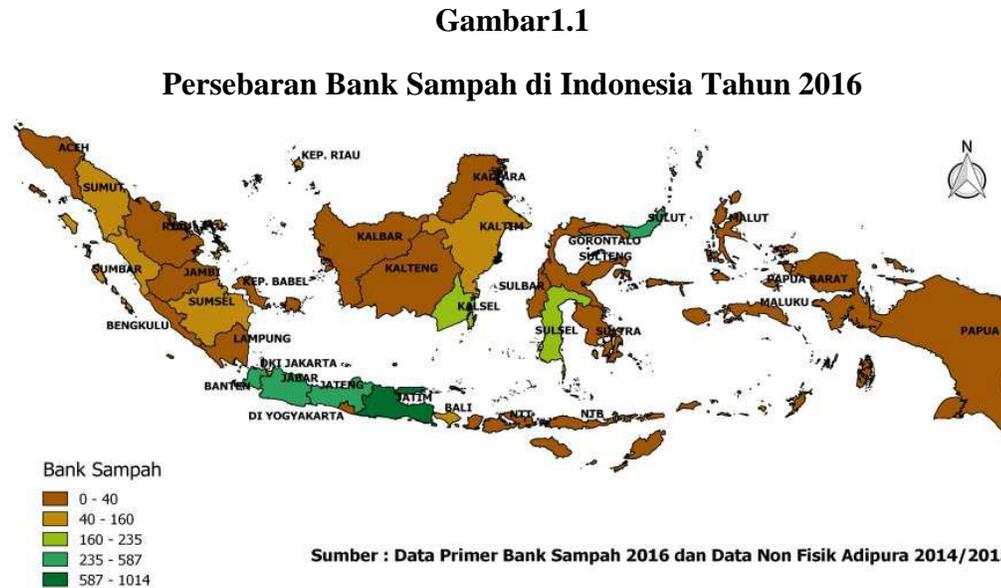
Selaras dengan tujuan PBB yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim, di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah karena sampah turut berkontribusi pada timbulnya gas yang secara akumulatif kemudian menyebabkan perubahan iklim. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Indonesia, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri agar seluruh sampah atau limbah dapat dikelola dengan baik dan tidak memperparah kerusakan lingkungan.

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui bank sampah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Berdasarkan regulasi tersebut, bank sampah dapat diartikan sebagai tempat pengumpulan dan pemilahan sampah yang dapat didaur atau diguna ulang, khususnya

yang bernilai ekonomi. Bank sampah memiliki beberapa manfaat dalam beberapa aspek seperti aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Apabila ditinjau dari aspek lingkungan hidup, bank sampah memiliki fungsi untuk mewujudkan lingkungan dan permukiman yang bersih, sehat, dan nyaman (Asy'ari, 2017). Selain itu apabila dilihat dari aspek ekonomi, bank sampah dapat meningkatkan pendapatan warga sekitar (Wardani, 2016: 109). Seperti dikutip dari Suwerda (dalam Ningsih, 2017), bank sampah juga memberikan beberapa manfaat sosial. Pertama, mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah berdasarkan masing-masing jenisnya. Kedua, pelatihan yang diselenggarakan dapat mengembangkan pola pikir kreatif masyarakat dalam daur ulang sampah. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah, khususnya sampah rumah tangga.

Bank sampah menggunakan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam proses pengolahan sampah. *Reduce* merujuk pada upaya pengurangan pola hidup konsumtif untuk mengurangi jumlah sampah. *Reuse* merujuk pada pemanfaatan kembali bahan sampah dengan menggunakannya berulang kali. *Recycle* adalah upaya pemilihan dan pengolahan sampah menjadi produk baru yang bermanfaat (Arisona, 2018: 42). Seperti yang dikutip dari Purba, dkk (dalam Purwanto, 2019: 28) upaya pengelolaan sampah berbasis 3R akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah mengingat upaya pengurangan jumlah sampah berkaitan erat dengan perubahan pola hidup masyarakat. Persebaran bank sampah di Indonesia dapat dilihat dalam Gambar 1.1



Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, (BPS, 2018: 13)

Berdasarkan gambar 1.1 tampak bahwa pada tahun 2016 tercatat bahwa seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki bank sampah. Persebaran bank sampah paling banyak berada di Pulau Jawa, terbanyak di Jawa Timur. Jumlah bank sampah di Jawa Timur mencapai lebih dari 587 bank sampah sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Barat sebanyak 235-587 bank sampah. Daerah dengan jumlah bank sampah yang rendah adalah Papua dengan jumlah bank sampah tidak lebih dari 40 bank sampah. Apabila dilihat dari total bank sampah yang ada maka kontribusi bank sampah dalam proses pengurangan sampah masih tergolong rendah yaitu hanya sebesar 0,14 persen (Badan Pusat Statistik, 2018). Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan sistem pengelolaan sampah, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 34,55 juta jiwa pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018). Tingginya angka jumlah penduduk

inilah yang menjadi penyebab meningkatnya volume sampah. Volume sampah di Jawa Tengah sebesar 15,671 ton per hari dan mencapai 5,7 juta ton per tahun.

BPS Provinsi Jawa Tengah (2013), membagi sampah ke dalam 9 jenis, yang tertuang dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1

Presentase Sampah Jawa Tengah Berdasarkan Jenisnya

| Jenis Sampah | Presentase |
|------------------------|-------------------|
| Organik | 56,34% |
| Plastik | 20,62% |
| Kertas | 9,35% |
| Kayu | 3,71% |
| Kain | 3,21% |
| Gelas dan Kaca | 1,99% |
| Karet dan Kulit Tiruan | 1,82% |
| Logam | 1,72% |
| Sampah lain-lain | 1,24% |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2013)

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat bahwa wilayah Jawa Tengah didominasi oleh sampah organik dan plastik. Daerah dengan jumlah sampah tertinggi yaitu Kabupaten Brebes yang mencapai 9,25 ribu meter kubik per hari, disusul Kabupaten Tegal sebesar 6,55 ribu meter kubik per hari dan Kota Semarang sebesar 4,55 ribu meter kubik per hari (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016: 168)

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi menjadi peringkat ketiga penyumbang sampah tertinggi di Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kota Semarang terangkum dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang 2017-2019

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Penduduk | 1,658,552 | 1,668,578 | 1,674,358 |

Sumber : (Statistik Jumlah Penduduk Kota Semarang, 2019)

Berdasarkan data dalam tabel 1.1. terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Semarang selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penduduk ditambah pola hidup masyarakat perkotaan yang cenderung semakin konsumtif selanjutnya berdampak pada beberapa aspek, salah satunya adalah masalah lingkungan seperti meningkatnya volume sampah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Azaria Eda Pradana (2017) ditemukan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan jumlah sampah yang tergolong tinggi dengan persentase kenaikan volume sampah mencapai 11,52 persen (Pradana, 2017: 3). Berdasarkan data DLH Kota Semarang (2019) produksi sampah Kota Semarang mencapai 1200 ton setiap harinya dan sekitar 850 hingga 900 ton dari total sampah langsung dibuang di TPA Jatibarang sedangkan jumlah sampah maksimum yang dapat diolah menjadi kompos setiap harinya hanya sebesar 150 ton atau hanya sekitar 10% dari total sampah di Kota Semarang yang didaur ulang. Jumlah ini masih jauh dari target nasional dan Kota Semarang terkait persentase daur ulang sampah yakni sebesar 30% pada 2025 (Setiadi, 2020: 49). Seperti dikutip dari artikel "Bom Waktu Sampah" (Purnaweni, 2017: 4), apabila kondisi ini terjadi secara terus

menerus maka akan menjadi masalah karena TPA Jatibarang akan mengalami *overload*.

Dengan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa setiap orang wajib turut serta dalam pengurangan sampah dengan melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berupaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah melalui bank sampah yang wajib didirikan di setiap kelurahan dan dikelola oleh masyarakat kelurahan itu sendiri.

Beberapa penelitian terkait bank sampah telah dilakukan di beberapa daerah, salah satunya adalah terhadap Bank Sampah Semali Berseri yang terletak di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudati Nur Sarfiah dan Whinarko Juliprijatno menunjukkan bahwa Bank Sampah Semali Berseri memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat dalam aspek lingkungan dan ekonomi. Masyarakat merasa bank sampah mampu mengurangi tumpukan sampah serta meningkatkan ekonomi masyarakat meskipun dalam jumlah yang masih tergolong (Sarfiah, 2017: 182).

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah terhadap bank sampah di Kota Makassar diperoleh bahwa Bank Sampah di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berhasil mengurangi jumlah sampah di TPA karena terdapat pemilahan serta pengolahan sampah terlebih dahulu yang dilakukan di masing-masing bank sampah (Khatimah, 2018: 77). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila bank sampah berjalan secara optimal di suatu daerah maka dapat memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Hingga tahun 2019, Kota Semarang hanya memiliki 57 bank sampah yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang padahal ditargetkan bahwa setiap kelurahan memiliki minimal satu bank sampah sehingga seharusnya terdapat paling sedikit 177 bank sampah di Kota Semarang.

Terkait dengan pelaksanaan bank sampah di Kota Semarang, sebagaimana dikutip dari Setiadi (2020) (dalam *www.theconversation*), secara umum masih terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bank sampah di Kota Semarang. Pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Masyarakat menganggap bahwa sampah-sampah tersebut pada akhirnya akan masuk ke dalam bak yang sama sehingga masyarakat cenderung malas untuk memilah sampah.

Permasalahan selanjutnya adalah masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah di beberapa bank sampah. Pemerintah Kota Semarang terlihat kewalahan dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung kinerja bank sampah sedangkan apabila suatu bank sampah kekurangan sarana prasarana maka proses pengolahan sampah pun akan terkendala.

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan bank sampah di Kota Semarang adalah masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengelola bank sampah terkait dengan proses pengolahan sampah. Umumnya bank sampah dikelola oleh individu ataupun kelompok secara sukarela, namun tidak semua pengelola bank sampah paham betul mengenai bagaimana sistem pengelolaan bank sampah yang benar. Apabila pengelola bank sampah tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka kinerja bank sampah tersebut tidak akan maksimal.

Apabila ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2020) maka tampak bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan bank sampah di Kota Semarang, yang meliputi: kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah, pengetahuan pengelola bank sampah mengenai pengelolaan sampah, dan sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di bank sampah. Ketiga faktor ini menjadi kunci dalam pelaksanaan bank sampah agar bank sampah dapat mencapai tujuannya dalam membantu proses pengelolaan sampah di Kota Semarang, khususnya di wilayah padat penduduk. Hal tersebut karena tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah akan selalu diiringi dengan tingginya jumlah sampah. Persebaran penduduk di Kota Semarang berdasarkan kecamatan terangkum dalam tabel 1.3

Tabel 1.3
Jumlah Kelurahan dan Persebaran Penduduk Kota Semarang 2019

| Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Penduduk |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Mijen | 14 | 74,696 |
| Gunungpati | 16 | 94,347 |
| Banyumanik | 11 | 140,419 |
| Gajahmungkur | 8 | 59,591 |
| Semarang Selatan | 10 | 68,507 |
| Candisari | 7 | 79,385 |
| Tembalang | 12 | 180,500 |
| Pedurungan | 12 | 192,424 |
| Genuk | 13 | 115,058 |
| Gayamsari | 7 | 73,716 |
| Semarang Timur | 10 | 72,433 |
| Semarang Utara | 9 | 130,434 |
| Semarang Tengah | 15 | 62,854 |
| Semarang Barat | 16 | 157,348 |
| Tugu | 7 | 33,308 |
| Ngaliyan | 10 | 139,338 |
| Jumlah | 177 | 1,674,358 |

Sumber : (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2020)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2 diketahui bahwa Kecamatan Pedurungan merupakan wilayah terpadat di Kota Semarang. Jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan tergolong tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 191,039 jiwa dan terus meningkat setiap tahunnya yakni mencapai 192,798 jiwa pada tahun 2018 dan 192,424 jiwa pada tahun 2019 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 disebutkan bahwa Kecamatan Pedurungan termasuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) V. Kawasan BWK V sendiri merupakan lokasi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, artinya bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan pun tergolong tinggi. Selain itu dalam RTRW Kota Semarang 2011-2031 tertuang bahwa akan terjadi pengembangan pusat perbelanjaan, ritel modern, serta jasa penginapan di seluruh BWK di Kota Semarang, tak terkecuali di Kecamatan Pedurungan.

Tingginya jumlah penduduk terlebih ditambah semakin meningkatnya fasilitas umum dan pusat-pusat bisnis di Kecamatan Pedurungan seperti hotel dan restoran menjadi penyebab tingginya volume sampah di Kecamatan Pedurungan. Jumlah timbulan sampah Kota Semarang per hari pada tahun 2017 terangkum dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4**Jumlah Timbulan Sampah Kota Semarang per hari (2017)**

| No | Kecamatan | Timbulan Sampah (ton) | Presentase |
|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Mijen | 132.71 | 2.80% |
| 2 | Gunungpati | 201.11 | 4.30% |
| 3 | Banyumanik | 365.88 | 7.80% |
| 4 | Gajahmungkur | 201.32 | 4.30% |
| 5 | Semarang Selatan | 273.01 | 5.80% |
| 6 | Candisari | 271.93 | 5.80% |
| 7 | Tembalang | 361.59 | 7.70% |
| 8 | Pedurungan | 482.05 | 10.30% |
| 9 | Genuk | 220.39 | 4.70% |
| 10 | Gayamsari | 220.9 | 4.70% |
| 11 | Semarang Timur | 286.3 | 6.10% |
| 12 | Semarang Utara | 429.42 | 9.10% |
| 13 | Semarang Tengah | 270.12 | 5.80% |
| 14 | Semarang Barat | 513.07 | 11.01% |
| 15 | Tugu | 84.48 | 1.80% |
| 16 | Ngaliyan | 364.06 | 7.80% |
| | Jumlah | 4678.34 | |

Sumber : DKP Kota Semarang (dalam Bahana, 2018)

Berdasarkan Tabel 1.3. terlihat bahwa Kecamatan Pedurungan menempati peringkat kedua kecamatan penghasil sampah tertinggi di Kota Semarang setelah Kecamatan Semarang Barat yaitu mencapai 482,05 ton sampah per hari atau menyumbang sekitar 10,30% dari total sampah Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rozzy Dhaniswara diketahui bahwa dari seluruh total sampah tersebut, sebesar 26 % sampah termasuk ke dalam jenis sampah organik dan 74% sisanya terdiri dari plastik, kertas, logam, karet, kain, dan sebagainya (Dhaniswara, 2014: 2). Jumlah penduduk Kecamatan Pedurungan yang tergolong tinggi dan cenderung meningkat

setiap tahunnya menjadi faktor penyebab utama tingginya jumlah sampah di Kecamatan Pedurungan. Hal ini dikarenakan setiap rumah tangga pasti menghasilkan berbagai macam sampah setiap harinya dengan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu sampah non rumah tangga seperti sampah pasar serta sampah restoran juga dihasilkan di Kecamatan Pedurungan yang menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk serta pola hidup konsumtif masyarakat namun tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian Agra Bahana (2018) ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Pedurungan cenderung memiliki kesadaran rendah akan pentingnya pengelolaan sampah yang dibuktikan dengan masih terdapat penumpukan sampah yang tinggi di Kecamatan Pedurungan (Bahana, 2018: 155). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, salah satunya melalui pendirian bank sampah, tidak terkecuali di Kecamatan Pedurungan.

Berdasarkan data DLH Kota Semarang pada tahun 2019, hanya terdapat enam bank sampah di Kecamatan Pedurungan sedangkan apabila ditinjau dari target awal seharusnya terdapat paling sedikit 12 bank sampah di Kecamatan Pedurungan. Dari keenam bank sampah ini, dua diantaranya terdapat di Kelurahan Pedurungan

Kidul dan keempat sisanya tersebar di empat kelurahan yakni Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Kalicari, Kelurahan Plamongan Sari, dan Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Pedurungan Kidul merupakan kelurahan dengan jumlah bank sampah tertinggi dibanding keempat kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Pedurungan. Salah satu dari bank sampah tersebut, yakni Mekar Jaya merupakan bank sampah yang berhasil mengumpulkan sampah tertinggi di Kecamatan Pedurungan, yakni sebesar 1546,2 kg/bulan atau setara dengan 18,35 ton/tahun (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2020)

Apabila ditinjau dari data tersebut maka seharusnya Kelurahan Pedurungan Kidul mampu menjadi kelurahan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat terbaik di Kota Semarang. Namun pada realitanya, bank sampah belum berkontribusi banyak dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul dan kedua bank sampah yang tersisa pun memiliki kinerja yang berbeda.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa meskipun Kelurahan Pedurungan Kidul memiliki jumlah bank sampah tertinggi se-Kecamatan Pedurungan namun pada faktanya bank sampah yang ada belum mampu mengurangi timbulan sampah di TPS secara signifikan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Bagaimana Pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang?”**

1.2. Identifikasi Masalah

- 1.2.1. Pertumbuhan jumlah penduduk dan pola hidup konsumtif merupakan penyebab utama tingginya volume sampah
- 1.2.2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Pedurungan akan pemilahan dan pengelolaan sampah
- 1.2.3. Masih rendahnya kontribusi bank sampah dalam mengurangi sampah di TPS Kelurahan Pedurungan Kidul

1.3. Rumusan Masalah

- 1.3.1. Bagaimana pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang?
- 1.3.2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul
- 1.4.2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul

1.5. Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai kondisi serta sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Pedurungan Kidul.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi *stakeholder* dalam mengembangkan Program Bank Sampah di Kota Semarang

1.6.Kajian Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan serta referensi. Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menyusun proposal penelitian ini secara sistematis serta untuk menambah referensi peneliti mengenai teori dan konsep penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sepuluh penelitian terdahulu sebagai acuan yang terangkum dalam Tabel 1.5

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

| No | Judul, Penulis, Tahun | Tujuan | Metode | Hasil | Perbedaan |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| Pengelolaan Sampah | | | | | |
| 1 | <i>Waste Management in KFC and Pizza Hut Case Study in Semarang, Indonesia.</i> (Alfagi, Abdulfatah, Hartuti Purnaweni, 2015: 1-15) | Untuk menganalisis partisipasi konsumen dalam pengelolaan sampah di restoran cepat saji | Menggunakan metode kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian dan grafik. | Konsumen “Pizza Hut” lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dibanding konsumen “KFC”. Sekitar 90% konsumen Pizza Hut setuju untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sementara hanya 50% konsumen KFC yang setuju. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengubah kebiasaan konsumen dalam upaya pengelolaan sampah, khususnya di restoran cepat saji. | Terdapat perbedaan fokus penelitian yaitu tingkat partisipasi sasaran dalam pengelolaan sampah di restoran cepat saji. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah. |
| Bank Sampah | | | | | |
| 2 | Manajemen Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang | Untuk menganalisis proses manajemen dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ beserta | Metode deskriptif kualitatif. Indikator yang dinilai adalah pada sisi pemberdayaan masyarakat dengan | Secara keseluruhan, proses manajemen bank sampah telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni pada aspek | Penelitian menggunakan teori manajemen publik dengan 4 indikator (<i>planning, organizing, actuating, controlling</i>) |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | (Wicaksono & Warsono, 2020) | faktor-faktor yang mempengaruhinya. | berpedoman pada 4 prinsip manajemen. | SDM pengelola dan kesadaran masyarakat yang belum maksimal. | sementara penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan. |
| 3 | Program Bank Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Semarang (Studi di Bank Sampah Soka Resik, Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang) (Setyarini et al., 2020) | Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Bank Sampah Soka Resik dalam upaya keberhasilan pengelolaan sampah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Dusun Soka. | Metode deskriptif kualitatif dengan perspektif evaluasi kebijakan. | Bank Sampah Soka Resik telah berjalan dengan cukup baik dan telah memberikan berbagai manfaat bagi warga sekitar dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan adanya perbaikan dalam pelaksanaan bank sampah. | Terdapat perbedaan indikator. Penelitian oleh Setyarini mengacu pada 3 indikator yang dikemukakan oleh <i>United Nations</i> sementara penelitian ini berpedoman pada indikator evaluasi menurut William Dunn. |
| 4 | <i>The Benefit of Waste Bank for Poor Families in Sicanang Belawan, Medan, North Sumatra</i> , (Mujahiddin and Ananda Mahardika, 2017: 37-43) | Untuk menganalisis manfaat bank sampah bagi keluarga miskin di Desa Sicanang | Metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian utama adalah warga miskin. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat dua manfaat yang diperoleh dari adanya bank sampah, yakni manfaat ekonomi dan sosial ➤ Diperlukan adanya peningkatan kemampuan individu terkait daur ulang sampah anorganik. | Penelitian hanya melihat pada manfaat bank sampah bagi warga miskin sementara penelitian ini melihat secara mendalam bagaimana pelaksanaan bank sampah secara keseluruhan. |
| 5 | Manfaat Bank Sampah Bagi Masyarakat di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang (<i>Study Bank</i> | Menganalisis bagaimana dampak Bank Sampah Semali Berseri dalam aspek lingkungan dan ekonomi | Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan adalah <i>probability</i> | Bank Sampah Semali Berseri memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bank sampah dapat meningkatkan | Penelitian ini menggunakan perspektif evaluasi proses dengan teknik pemilihan informan adalah |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | <i>Sampah Semali Berseri</i> , (Sarfiyah, 2017: 165-184) | | <i>sampling</i> dengan pendekatan evaluasi dampak. | kelestarian lingkungan karena mengurangi tumpukan sampah serta bank sampah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat walaupun jumlahnya masih tergolong kecil. | <i>purposive sampling</i> |
| 6 | Evaluasi Program Pengelolaan Bank Sampah Unit Mawar Merah di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. (Khatimah, 2018) | Mengevaluasi pelaksanaan Bank Sampah Unit Mawar Merah beserta dampaknya bagi masyarakat | Metode deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada teori evaluasi menurut Wiryawan yang meliputi evaluasi proses, manfaat, dan dampak | Bank Sampah Unit Mawar Merah berjalan dengan cukup baik dan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah persampahan di Kota Makassar. Bank Sampah Unit Mawar Merah juga memberi dampak positif bagi masyarakat baik dalam aspek lingkungan maupun ekonomi | Penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi proses tanpa melihat dampak kebijakan. |
| 7 | Evaluasi Kinerja dan Keberlanjutan Program Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R (<i>Studi Kasus Kota Cimahi</i>). (Triana, 2018: 69-78) | Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dalam pelaksanaan bank sampah di Kota Cimahi | Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan beberapa teknik analisis: analisis efektivitas, analisis SWOT, | Bank sampah di Kota Cimahi terbagi dalam beberapa kategori wilayah. Presentase jumlah sampah yang dikelola masing-masing bank sampah setiap harinya cukup | Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi proses dengan indikator: efektivitas, kecukupan, responsivitas, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | | | dan analisis finansial. | tinggi namun masih diperlukan adanya beberapa perbaikan. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan aspek utama yang mempengaruhi kinerja bank sampah di Kota Cimahi. | pemerataan, dan ketepatan. |
| 8 | Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya, (Heruman, 2016: 136-141) | Untuk menganalisis manfaat bank sampah sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah | Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi dampak dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya edukasi bank sampah. | Bank Sampah Pucuk Resik (BSPR) memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dari adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kelestarian lingkungan. | Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi proses yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan bank sampah saat ini tanpa membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya bank sampah. |
| 9 | Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah "Pendowo Berseri" Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Community Participation In Waste Bank Program "Pendowo Berseri" Tritih Wetan Village Jeruklegi District | Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat di Bank Sampah "Pendowo Berseri" | Metode deskriptif dengan indikator penelitian hanya berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat. | Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hingga evaluasi pengelolaan sampah di Bank Sampah "Pendowo Berseri" tergolong tinggi. Selain itu, Bank Sampah | Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan. Tingkat partisipasi masyarakat akan dilihat dalam indikator responsivitas dan pemerataan. |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| | Cilacap Regency) (Fauzi, 2017: 43-48) | | | “Pendowo Berseri” memiliki sarana prasarana yang tergolong lengkap yang dapat menunjang keberhasilan bank sampah. | |
| 10 | Partisipasi Masyarakat Pada Bank Sampah : Studi Kasus Eksploratif di Kabupaten Banyumas, (Widiyanto, 2017: 367-376) | Untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bank sampah di Kabupaten Banyumas | Metode eksploratif untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bank sampah. Indikator yang digunakan meliputi perilaku, pengetahuan, pemahaman, dan motivasi masyarakat. | Masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Bank Sampah di Kabupaten Banyumas. Selain itu masih diperlukan adanya motivasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bank sampah | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan. |

Sumber: Beberapa jurnal yang diolah

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa Program Bank Sampah telah terlaksana di beberapa kota di Indonesia dengan cukup baik dan memberi dampak positif bagi warga sekitar walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan lokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi proses dan mengacu pada lima indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang terdiri atas: (1) efektivitas, (2) kecukupan, (3) pemerataan, (4) responsivitas, (5) ketepatan. Lokus dari

penelitian ini adalah Bank Sampah Aisah dan Bank Sampah Mekar Jaya yang keduanya terletak di Kelurahan Pedurungan Kidul.

1.6.2. Administrasi Publik

Waldo (dalam Syafie, 2006: 25) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan pemerintah melalui manajemen organisasi manusia-manusia dan peralatannya. Litchfield (dalam Syafie, 2006) dan Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 3) memiliki pendapat yang sama mengenai pengertian administrasi publik yakni sebagai upaya-upaya pengorganisasian badan pemerintahan dalam proses formulasi, implementasi, serta pengelolaan kebijakan publik.

Mc.Curdy (dalam Keban, 2008) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses penerapan fungsi dengan cara yang prinsipil.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi publik untuk menyelesaikan masalah-masalah publik demi kesejahteraan masyarakat.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma menurut Kuhn (dalam Syafie, 2006: 26) merupakan suatu cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Dalam perkembangannya, Nicholas Henry (dalam Keban, 2008: 31) membagi administrasi publik kedalam lima paradigma yang terdiri atas:

1. Paradigma Dikotomi Politik (1900-1926)

Paradigma ini menganggap bahwa harus ada pemisahan antara politik dan administrasi, termasuk pemisahan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Seperti dikutip dari (Sedarmayanti, 2013: 18), dalam hal ini badan legislatif bertugas menyampaikan keinginan rakyat sedangkan badan eksekutif berperan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Lokus dalam paradigma ini adalah birokrasi pemerintah sedangkan fokus dalam paradigma ini belum jelas (Keban, 2008: 32).

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip administrasi yang dikemukakan dalam paradigma ini adalah empat prinsip manajemen yang diperkenalkan oleh Fayol dan Taylor yang meliputi *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting* (POSDCORB) (Sedarmayanti, 2013: 19). Paradigma ini lebih menekankan pada fokus, sedangkan lokus dalam paradigma ini tidak pernah diungkapkan secara jelas karena dianggap bahwa *POSDCORB* dapat diterapkan di sektor manapun.

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

John Gaus (dalam Sedarmayanti, 2013: 19) menyebutkan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga merupakan teori politik. Lokus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan sementara fokusnya dianggap kabur karena ditemukan banyak kelemahan dalam prinsip administrasi publik.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini mencakup analisis manajemen, perilaku organisasi, metode kuantitatif, dan sebagainya.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Dalam paradigma ini, fokus dan lokus administrasi publik telah diketahui secara jelas. Fokus administrasi publik adalah kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi sementara lokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah masalah dan kepentingan publik.

1.6.4. Kebijakan Publik

Friedrich (dalam Agustino, 2008: 186) mengartikan kebijakan sebagai suatu atau serangkaian tindakan yang diambil, yang di dalamnya terdapat hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Thomas Dye (1981: 1) dan Anderson (1979: 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala keputusan yang diambil pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu (dalam Subarsono, 2013: 2).

Michael C. Lemay (2002: 11) dan Chandler dan Plano (dalam Syafie, 2006: 115) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik. Sedangkan Udoji (dalam Wahab, 2015: 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang saling terkait dan memberi pengaruh bagi sebagian besar masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

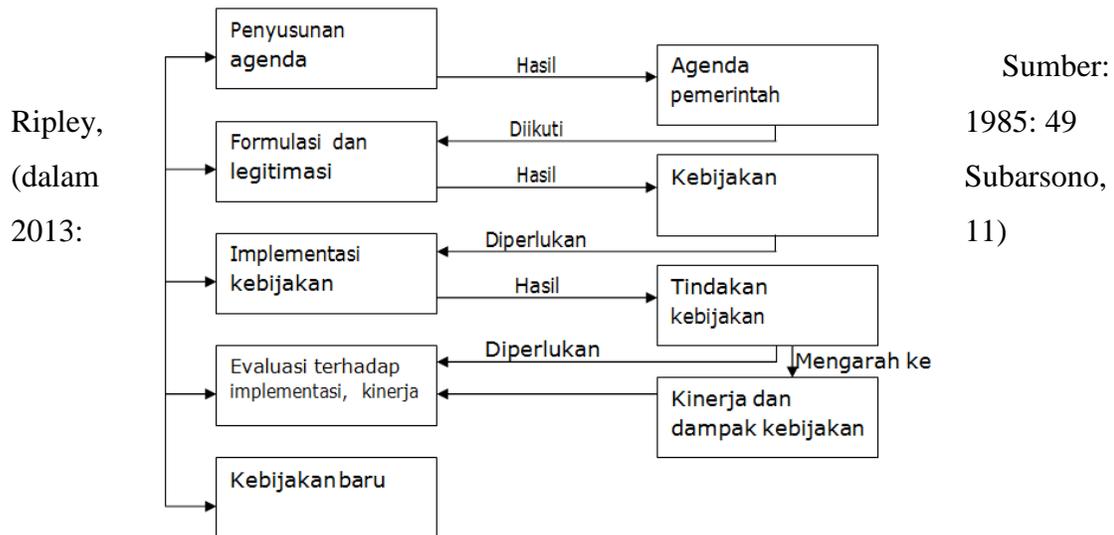
Sehingga kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang ditempuh *stakeholders* untuk menyelesaikan masalah-masalah publik melalui suatu peraturan atau program.

1.6.5. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan politis, mulai dari tahap penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (Subarsono, 2013: 8). Dror (1971) dan Kent (1971) (dalam Wahab, 2015: 41) memiliki pendapat yang hampir sama terkait pengertian analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik menurut Dror dan Kent diartikan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu alternatif atau rekomendasi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah publik. Analisis kebijakan publik menurut Ripley (dalam Subarsono: 2013: 11) terdiri atas lima tahap sebagai berikut:

Gambar 1.2

Tahap-tahap Analisis Kebijakan Publik



Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa analisis kebijakan publik terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama adalah penyusunan agenda yang terdiri atas tiga kegiatan penting yakni membangun persepsi *stakeholders* mengenai fenomena atau permasalahan yang terjadi, penentuan batas-batas masalah, dan mobilisasi dukungan agar fenomena tersebut mendapat dukungan dari pemerintah dan dapat menjadi agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan dapat dilakukan melalui pengorganisasian kelompok masyarakat dan kepentingan politik, publikasi media massa, dan lain-lain.

Tahap selanjutnya adalah formulasi dan legitimasi yang merupakan tahapan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang ada dan melakukan pengembangan alternatif-alternatif kebijakan sehingga akan dihasilkan suatu kebijakan. Setelah ditetapkan suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan diimplementasikan yang membutuhkan dukungan sumberdaya. Tahap implementasi

selanjutnya akan menghasilkan kinerja dan dampak kebijakan. Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap ketiga tahap sebelumnya yakni implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Hasil dari evaluasi ini selanjutnya dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan yang ada atau dalam penyusunan kebijakan baru yang akan datang sehingga lebih baik dan efektif dari sebelumnya.

Penelitian ini akan berfokus pada pada tahap evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mendapatkan informasi atau gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul.

1.6.6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menurut Anderson (dalam Winarno, 2008: 166) dan Dye (dalam Parsons, 2006) merupakan suatu proses penilaian kebijakan untuk melihat keberhasilan kebijakan yang ditinjau dari substansi, pelaksanaan, serta dampak kebijakan. Berdasarkan definisi tersebut maka evaluasi kebijakan mencakup evaluasi terhadap perumusan kebijakan, evaluasi ketika program sedang berjalan atau *monitoring*, dan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan telah selesai diimplementasikan.

Sementara itu, Briant & White (dalam Wibawa, 1994: 63) mengarahkan evaluasi kebijakan pada tahap implementasi, yang mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus mampu menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan.

Suchman (dalam Khatimah, 2018: 12) memiliki pandangan yang sejalan dengan Briant & White mengenai evaluasi. Menurut Suchman keberhasilan suatu program evaluasi dilihat dari kemanfaatannya bagi administrator dalam memberikan pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Samodra Wibawa mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan atau mengenai bagaimana suatu program berlangsung serta mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat diperbaiki agar nantinya diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik (Wibawa, 1994: 13-14)

Evaluasi dilakukan karena adanya kemungkinan bahwa tidak semua kebijakan terlaksana sesuai rencana. Hasil evaluasi selanjutnya akan menghasilkan umpan balik secara rutin yang dapat digunakan dalam proses pengembangan atau perbaikan program sehingga penanggulangan kendala pun dapat dilakukan secepatnya (Arifin, 2019: 157)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu tahap yang dilaksanakan untuk melihat apakah suatu kebijakan atau program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sekaligus dapat memberi manfaat bagi administrator.

1.6.6.1. Tipe Evaluasi

Langbein (dalam Widodo (Khasanah, 2018)) membedakan riset evaluasi ke dalam dua tipe yakni riset proses dan riset *outcomes*. Metode riset evaluasi juga terbagi ke dalam dua macam yakni deskriptif, yang lebih mengarah pada penelitian evaluasi

proses dan metode kausal, yang lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak. Metode deskriptif menganalisis apakah seluruh program telah tercapai dengan baik atau sebaliknya serta mengevaluasi bagaimana derajat keuntungan yang ditetapkan dirasakan atau dinikmati oleh sasaran. Terdapat tiga pertanyaan utama dalam metode deskriptif. Apakah sumber daya digunakan dalam kebijakan? Bagaimana derajat manfaat atau keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan? Apakah manfaat dapat dinikmati secara nyata oleh sasaran?

Sementara itu, riset kausal melihat apakah program utama merupakan penyebab adanya dampak utama. Terdapat tiga pertanyaan utama dalam metode kausal, yaitu siapa yang terlibat dalam kebijakan? Apakah kebijakan dapat menghasilkan *outcomes* yang diharapkan atau tidak diharapkan? Faktor implementasi mana yang menghasilkan manfaat utama yang terjadi karena kebijakan utama? Apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama?

Berdasarkan dua metode tersebut, maka metode yang tepat dalam mengevaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul adalah metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan Program Bank Sampah, apakah bank sampah telah terlaksana sesuai dengan rencana.

Rossi (dalam Joko Widodo (Purwanto, 2018)) membagi riset evaluasi ke dalam lima tipe secara lebih komprehensif, yang meliputi:

1. *Research for Program Planning Development*

Tipe ini bertujuan untuk merancang suatu kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Pertanyaan penting dalam tipe evaluasi ini adalah berapa banyak masalah yang ada dan di mana saja masalah ditemukan?

Hasil yang diharapkan dari riset evaluasi tipe ini adalah bahwa evaluasi akan menghasilkan informasi apakah mungkin suatu kebijakan dirancang secara optimal dengan menggunakan informasi yang berkaitan dengan masalah dan lokasi di mana masalah ditemukan.

2. *Project Monitoring Evaluation Research*

Riset evaluasi tipe ini bertujuan untuk menguji apakah kebijakan telah terlaksana sesuai rancangan. Terdapat dua pertanyaan penting dalam tipe ini yakni:

- 1) Apakah dalam praktiknya usaha yang diambil telah sesuai dengan rancangan?
- 2) Apakah kebijakan telah mencapai sasaran?

Terdapat dua alasan mengapa riset evaluasi monitoring kebijakan perlu dilakukan:

1. Suatu kebijakan membutuhkan pengalaman nyata yang dikehendaki sehingga membutuhkan administrasi sumber daya yang tepat
2. Tidak adanya dampak dari kebijakan utama yang diterima oleh implementor, yang disebabkan karena:
 - a. Beberapa kebijakan tidak diimplementasikan sesuai cara-cara yang telah dirancang dan direncanakan.

- b. Tidak tercukupinya personil dan perlengkapan
- c. Kurangnya kemampuan dan motivasi pelaksana
- d. Pihak partisipan yang jumlahnya tidak sesuai target ataupun tidak mau bekerja sama

Tipe evaluasi ini menghasilkan penilaian sistematis tentang apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana dan telah mencapai sasaran kebijakan.

3. *Impact Evaluation*

Tipe ini mengarah pada sampai sejauh mana kebijakan menyebabkan perubahan sesuai yang dikehendaki. Dalam hal ini, definisi mengenai tujuan dan kriteria keberhasilan perlu disiapkan. Riset mengenai evaluasi dampak penting untuk dilakukan ketika ingin membandingkan suatu kebijakan yang berbeda dan menguji penggunaan berbagai usaha baru dalam memecahkan masalah publik.

4. *Economic Efficiency Evaluation*

Riset evaluasi tipe ini bertujuan untuk menghitung efisiensi ekonomi kebijakan. Akar dari tipe ini adalah bahwa terdapat keterbatasan sumber daya sementara banyak kebijakan yang membutuhkan dana. Pendekatan yang digunakan dalam tipe ini adalah pada *cost benefit* dan *effectiveness analysis*. Pertanyaan penting dalam tipe ini adalah apakah suatu kebijakan menghasilkan cukup keuntungan apabila dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan dan apakah suatu kebijakan yang diharapkan dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan lebih jika dibandingkan dengan *outcomes* per unit?

5. *Comprehensive Evaluation*

Riset evaluasi tipe ini mencakup pelaksanaan, dampak, hingga *cost and benefit* dalam suatu kebijakan. Fokus dari riset evaluasi tipe ini adalah apakah kebijakan dilakukan sesuai rencana, apakah kebijakan menghasilkan perubahan yang dikehendaki, dan bagaimana tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan.

Penelitian ini menggunakan tipe evaluasi *Project Monitoring Evaluation Research* karena bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, apakah telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

1.6.6.2. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan atau monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program dalam waktu yang sedang berjalan serta mencoba mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan agar upaya penanggulangan dapat dilakukan sedini mungkin (Priambodo, 2014).

Sejalan dengan Priambodo, Samodra Wibawa mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan atau mengenai bagaimana suatu program berlangsung serta mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat diperbaiki agar nantinya diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik (Wibawa, 1994: 13-14).

Monitoring dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai apakah pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan rencana dalam upaya pencapaian tujuan atau dengan kata lain monitoring melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan

perencanaan. Apabila pelaksanaan program berbeda dengan rencana, maka monitoring berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi di mana letak perbedaan dan permasalahan yang kemudian hasilnya digunakan untuk mencari solusi dalam upaya penyempurnaan program (Arifin, 2019).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa monitoring kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pada saat kebijakan sedang berjalan untuk mengamati dan memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut.

Subarsono (2013: 114) mengemukakan beberapa tujuan monitoring kebijakan, yang meliputi:

1. Menjaga kebijakan yang sedang diimplementasikan agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran
2. Mengidentifikasi kesalahan atau permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan sedini mungkin guna mengurangi risiko yang lebih besar
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama program sedang berjalan.

1.6.6.3. Indikator Evaluasi Kebijakan

Indikator evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai aspek-aspek apa saja yang dapat digunakan untuk menilai keberjalanan program. Evaluasi terhadap

pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul akan ditinjau berdasarkan lima indikator evaluasi menurut Dunn (1994) yang terangkum dalam dalam tabel 1.6

Tabel 1.6
Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn

| No | Indikator | Penjelasan |
|----|---------------|--|
| 1 | Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? |
| 2 | Kecukupan | Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah? |
| 3 | Pemerataan | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda? |
| 4 | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka? |
| 5 | Ketepatan | Apakah hasil yang dicapai bermanfaat? |

Sumber : Dunn (dalam Subarsono, 2013: 126)

Kriteria-kriteria dalam evaluasi kebijakan menurut Dunn dapat dijabarkan sebagai berikut (Dunn, 2003: 429-439):

1. *Efektivitas* melihat apakah suatu alternatif mencapai tujuan yang direncanakan. Efektivitas bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul adalah sebuah indikator yang akan melihat apakah Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul telah berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan, hal ini akan dilihat dari kontribusi bank sampah dalam pengurangan sampah di TPS Kelurahan Pedurungan Kidul.

2. *Kecukupan* melihat bagaimana kebijakan atau program dapat memecahkan masalah. Indikator kecukupan digunakan untuk melihat apakah Program Bank Sampah merupakan suatu alternatif dalam pemecahan masalah persampahan di Kelurahan Pedurungan Kidul, hal ini akan dilihat dari total sampah yang dapat dikumpulkan dan dikelola bank sampah per bulannya.
3. *Pemerataan* melihat kewajaran konflik etis dalam masyarakat dalam upaya pendistribusian sumber daya. Indikator pemerataan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul merujuk pada kemudahan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, hal ini akan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam bank sampah dan apakah seluruh masyarakat dapat mengakses informasi mengenai bank sampah.
4. *Responsivitas* melihat bagaimana kebijakan dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan sasaran. Indikator responsivitas dalam pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul merujuk pada tingkat kepuasan kelompok sasaran Bank Sampah serta dukungan masyarakat terhadap program, hal ini dapat dilihat melalui bagaimana pendapat bank sampah terkait kesigapan DLH dalam pengadaan sarana operasional bank sampah serta tingkat partisipasi warga dalam bank sampah.
5. *Ketepatan* melihat apakah hasil dari suatu program atau kebijakan telah memberi manfaat bagi kelompok sasaran. Indikator ketepatan dalam pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul merujuk pada apakah pelaksanaan Program Bank Sampah telah memberi dampak positif bagi masyarakat, yang akan

dilihat melalui pendapat masyarakat mengenai manfaat yang ia rasakan (bidang lingkungan hidup, ekonomi, maupun sosial) setelah adanya bank sampah

1.6.7. Sampah

1.6.7.1. Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa aktivitas sehari-hari manusia maupun proses alam yang berbentuk padat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

AVMA (American Veterinary Medical Association, n.d.) mendefinisikan sampah sebagai segala sesuatu yang tidak lagi memiliki kegunaan dan perlu dibuang. Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah merupakan sisa-sisa bahan dari individu, kelompok, maupun pabrik yang sudah tidak terpakai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, sampah dapat dibedakan kedalam dua jenis, yakni:

e. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang akan hancur secara alami serta mudah membusuk karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contoh dari sampah organik adalah sampah sisa dapur, daun, sayur, buah, daging, nasi, dan sebagainya.

f. Sampah Non-organik

Sampah non-organik merupakan sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarui sehingga proses penguraiannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh dari sampah non-organik adalah botol, gelas, plastik, kaleng, dan sebagainya.

1.6.7.2. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu program pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada keterlibatan atau kontribusi seluruh masyarakat untuk terlibat penuh dalam penyelesaian permasalahan sampah di masing-masing wilayah. Seperti dikutip dari Modul Pengolahan Sampah Berbasis 3R (Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2010: 5), pengelolaan sampah berbasis masyarakat menggunakan prinsip 3R yang terdiri atas:

a. Reduce

Reduce menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pengurangan bahan-bahan sekali pakai. *Reduce* dapat dilakukan dengan: (1) memperbanyak penggunaan bungkus yang lebih mudah terurai seperti daun dan kertas; (2) mengurangi produksi kemasan khususnya makanan dan minuman kemasan; dan (3) mengembangkan teknik isi ulang air minum.

b. Reuse

Reuse menitikberatkan pada pemanfaatan bahan sampah melalui penggunaan berulang untuk fungsi yang sama maupun berbeda agar sampah tidak langsung dibuang. *Reuse* dapat digunakan melalui: (1) penggunaan ember bekas menjadi pot

bunga; (2) mengurangi pembelian minuman kemasan dengan membawa botol minum sendiri; dan (3) memanfaatkan koran menjadi pembungkus.

c. *Recycle*

Recycle merupakan upaya memanfaatkan kembali sampah namun melalui proses pengolahan atau daur ulang terlebih dahulu. Contoh dari penerapan *recycle* adalah: (1) pengolahan kembali pecahan beling menjadi gelas atau vas bunga; (2) pendaurulangan sampah organik menjadi pupuk kompos; dan (3) pengolahan plastik kemasan menjadi tas, tempat pensil, dsb.

1.6.7.3. Bank Sampah

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R, bank sampah dapat didefinisikan sebagai tempat pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah sehingga sampah dapat digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Menurut Suwerda (dalam Fauzi, 2017: 44) bank sampah merupakan sistem menabung sampah yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah.

Konsep Bank Sampah menurut (Joedianto, 2017: 4) merupakan konsep menabung sampah selayaknya bank komersial. Sampah yang telah disetor nasabah selanjutnya akan ditimbang untuk kemudian dihargai dengan sejumlah uang. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank sampah merupakan salah satu inovasi dalam upaya penyelesaian permasalahan sampah melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Seperti dikutip dari “3 Cara Mengelola Sampah Dengan Benar” (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2020), prinsip atau cara kerja bank sampah adalah sebagai berikut:

- a. Setiap rumah tangga melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing sesuai dengan jenis sampah. Apabila terdapat rumah tangga yang menyetor sampah tanpa dipilah terlebih dahulu maka petugas bank sampah akan membantu memilah sampah-sampah tersebut.
- b. Sampah yang telah dipilah kemudian akan ditimbang oleh petugas dan dicatat sesuai dengan komposisi dan berat masing-masing sampah dan catatan hasil penimbangan akan diberikan pada nasabah
- c. Catatan yang telah diterima nasabah harus disetorkan kepada petugas khusus tabungan dan akan dicatat dalam buku induk bank sampah sesuai dengan berat dan komposisi masing-masing sampah
- d. Sampah-sampah yang telah disetorkan oleh nasabah akan dikumpulkan dalam sebuah wadah besar dan selanjutnya akan diolah kembali oleh bank sampah ataupun pihak ketiga agar dapat menjadi barang yang lebih berguna.

1.6.8. Force Field Analysis

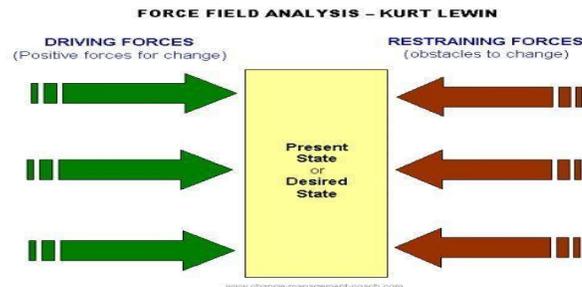
Force Field Analysis (FFA) dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) yang digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kekuatan ataupun hambatan yang dapat mempengaruhi perubahan suatu organisasi (Purwanto, 2018: 40). Menurut Narayanasamy (dalam Adhanita, 2013: 387), *FFA* digunakan untuk menganalisis

kekuatan yang dapat mempengaruhi situasi dan menyebabkan perubahan ke arah positif.

Konsep *Force Field Analysis* dapat dilihat pada Gambar 1.3

Gambar 1.3

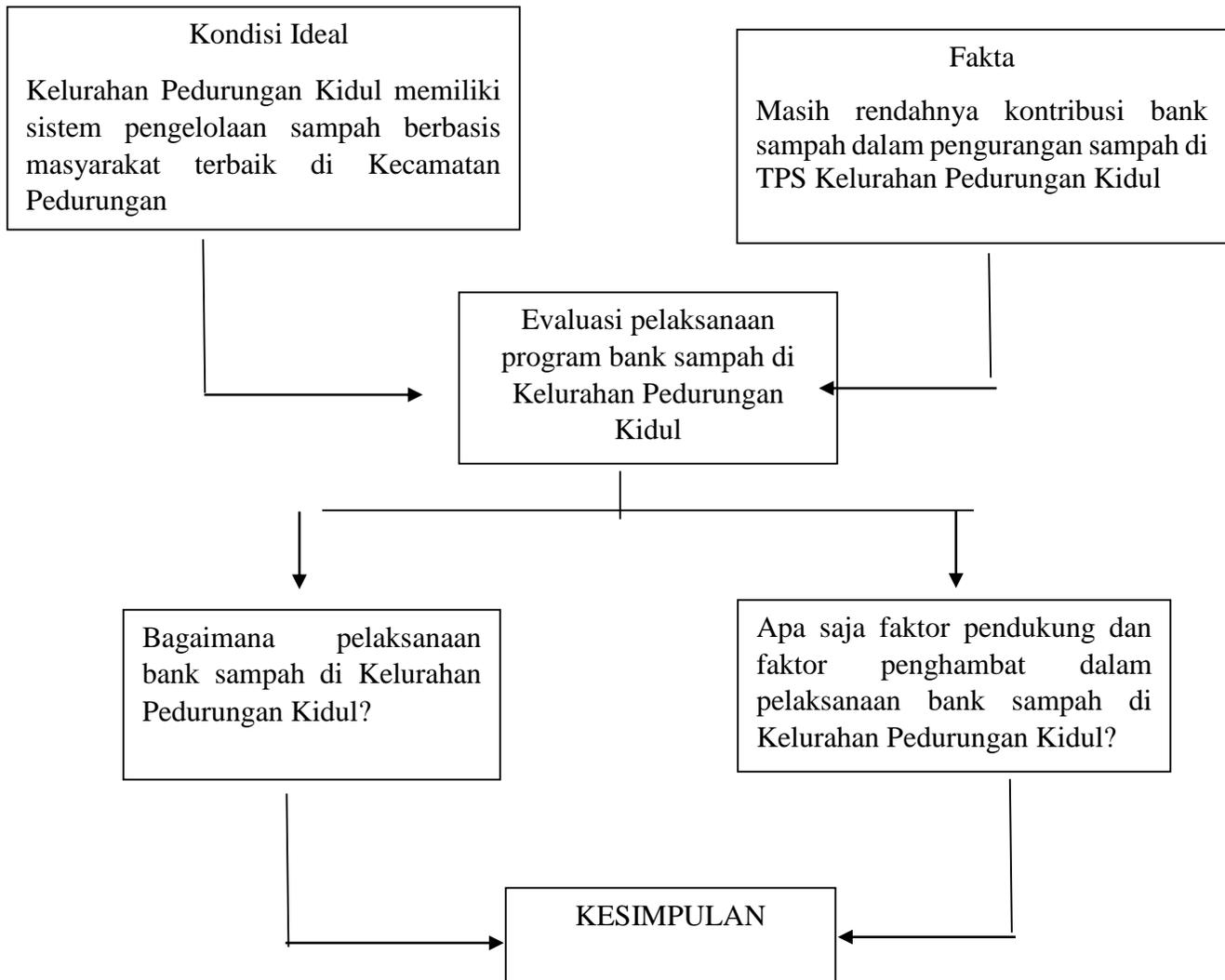
Force Field Analysis



Berdasarkan gambar 1.3. tampak bahwa *Force Field Analysis* bertindak sebagai penyeimbang antara faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat terwujudnya perubahan atau kondisi ideal (Purwanto, 2018). *Force Field Analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk membedakan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul merupakan faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi pelaksanaan bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, baik itu faktor internal (berasal dari anggota bank sampah itu sendiri) maupun faktor eksternal (masyarakat umum atau sarana pendukung). Kedua faktor tersebut akan diteliti melalui empat indikator berdasarkan Petunjuk Teknis TPS 3R (Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2017). Keempat indikator tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia, yang meliputi sistem manajemen yang dilakukan oleh pengurus bank sampah, pengetahuan dan kemampuan pengelola bank sampah dalam pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat akan manfaat bank sampah, dan partisipasi masyarakat dalam bank sampah.
2. Kelembagaan, yang akan dilihat melalui regulasi yang mengatur keberadaan bank sampah dan apakah masing-masing pengurus telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.
3. Sarana dan prasarana penunjang, yang dapat dilihat melalui tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul.
4. Komunikasi, yang dapat dilihat melalui bagaimana sosialisasi mengenai Bank Sampah kepada masyarakat di tingkat kelurahan maupun RT/RW.

1.7. Kerangka Pikir Penelitian



1.8. Operasionalisasi Konsep

1.8.1. Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan pada saat program sedang berjalan untuk melihat bagaimana pelaksanaan suatu program. Penelitian ini mengkaji mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul untuk melihat bagaimana pelaksanaan Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bank Sampah. Dalam melihat pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, penelitian ini mengacu pada lima kriteria evaluasi menurut William Dunn, yang terdiri atas:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul telah terlaksana sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan, yang akan ditinjau dari:

- a. Pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke TPS
- b. Peningkatan tingkat kepedulian masyarakat akan pemilahan sampah rumah tangga

2. Kecukupan

Kecukupan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah Program Bank Sampah merupakan suatu alternatif dalam pemecahan masalah

persampahan di Kelurahan Pedurungan Kidul. Indikator kecukupan akan dilihat dari:

- a. Volume sampah yang masuk ke bank sampah perhari
- b. Bagaimana proses pengelolaan sampah di bank sampah
- c. Volume sampah yang dapat didaur ulang oleh masing-masing bank sampah per hari

3. Pemerataan

Pemerataan dalam penelitian ini merujuk pada apakah seluruh masyarakat dapat mengakses dan berkontribusi dalam pemilahan sampah melalui bank sampah yang ada di Kelurahan Pedurungan Kidul. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Tingkat kontribusi masyarakat dalam bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul
- b. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul
- c. Bagaimana peran masing-masing pengurus maupun nasabah bank sampah

4. Responsivitas berkenaan dengan apakah bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul telah menjawab kebutuhan masyarakat mengenai penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga serta melihat dukungan

masyarakat terhadap pelaksanaan bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kesigapan DLH dalam pengadaan sarana operasional bank sampah
 - b. Tingkat dukungan masyarakat terhadap bank sampah
 - c. Sosialiasi mengenai manfaat bank sampah pada masyarakat
5. Ketepatan berkenaan dengan apakah pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul telah memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari apakah bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul telah memberi manfaat dalam aspek lingkungan hidup, sosial, maupun ekonomi bagi masyarakat.

1.8.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bank Sampah

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bank sampah merupakan faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul. Penelitian ini menggunakan teori *Force Field Analysis* dalam menganalisis faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul. Berdasarkan Petunjuk Teknis TPS 3R (Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2017), faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bank sampah di dapat dianalisis melalui beberapa aspek yakni:

a. Sumber Daya Manusia

1. Sistem manajemen yang dilakukan oleh pengurus bank sampah

2. Pengetahuan dan kemampuan pengelola bank sampah mengenai pengelolaan sampah

3. Kesadaran masyarakat akan manfaat bank sampah

4. Partisipasi Masyarakat

b. Komunikasi

1. Sosialisasi mengenai Bank Sampah kepada masyarakat

c. Kelembagaan Bank Sampah

1. Regulasi yang mengatur kelembagaan bank sampah

2. Struktur organisasi di masing-masing bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul

3. Apakah masing-masing pengurus telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

1. Apakah sarana prasarana penunjang yang ada telah memenuhi kebutuhan

2. Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul

3. Apakah terdapat bantuan sarana prasarana penunjang dari Pemkot Semarang ataupun donatur kepada bank sampah

1.8.3. Bank Sampah

Bank sampah merupakan salah satu inovasi dalam upaya penyelesaian permasalahan sampah dengan menggunakan prinsip 3R dengan menitikberatkan pada

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya dalam proses pemilahan dan daur ulang sampah.

1.9. Metode Penelitian

Dalam pemecahan masalah perlu adanya suatu teori serta metode khusus yang relevan sehingga dapat membantu pemecahan masalah. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara kerja dalam memahami obyek sasaran untuk memecahkan masalah (Subagyo, 2006).

1.9.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana tentang bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mencapai tujuan penelitian (Wiratna, 2014: 26). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Creswell (dalam Sugiyono, 2020: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu masalah sosial melalui pemahaman perilaku individu dan kelompok. Landasan teoritis dari penelitian kualitatif adalah pada fenomena penelitian atau fenomenologi. Fenomenologi sendiri dapat diartikan sebagai pengalaman subjektif tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Moelong, 2007: 14).

Singarimbun (dalam Setyawati, 2018: 50) mengemukakan bahwa terdapat dua tipe penelitian kualitatif yang meliputi penelitian eksploratif dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-komparatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Program Bank Sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan membandingkan pelaksanaan atau kinerja antara dua bank sampah.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dapat diartikan sebagai lokasi dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, lokus yang dipilih adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pencetus Program Bank Sampah dan dua bank sampah di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan yaitu Bank Sampah Mekar Jaya dan Bank Sampah Aisah. Peneliti memilih lokasi penelitian di kedua bank sampah tersebut karena ingin mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kedua bank sampah yang ada di Kelurahan Pedurungan Kidul.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian atau informan merupakan pihak-pihak yang dapat memberi informasi mengenai penelitian. Menurut Sugiyono (2020: 94) terdapat dua teknik dalam penentuan informan yakni *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Teknik pemilihan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan informan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memahami betul mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga akan memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi tentang objek yang diteliti (Sugiyono, 2020: 96). Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Staff Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2. Penanggung Jawab Bank Sampah Aisah

3. Penanggung Jawab Bank Sampah Mekar Jaya
4. Nasabah Bank Sampah Aisah
5. Nasabah Bank Sampah Mekar Jaya

1.9.4. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, uraian, sumber tertulis, laporan, serta foto. Penelitian ini tidak mengutamakan data yang berupa angka.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data dapat dibagi kedalam dua jenis yakni:

a. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta Bank Sampah “Mekar Jaya” dan “Aisah”.

b. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu serta laporan kinerja serta statistik data dari beberapa instansi pemerintahan sebagai sumber data sekunder.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2020: 104) dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif” menyebutkan bahwa terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang terdiri atas:

1. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (dalam Ningrum, 2015: 9) observasi merupakan proses pengamatan fenomena pada obyek penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Bank Sampah Aisah dan Bank Sampah Mekar Jaya. Secara lebih spesifik peneliti akan menggunakan tipe partisipasi pasif, dalam arti peneliti mendatangi dan mengamati lokasi namun tidak terlibat dalam kegiatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pertukaran informasi antara dua pihak melalui tanya jawab. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui fenomena atau permasalahan penelitian secara mendalam dari responden atau narasumber (Sugiyono, 2020: 114). Esterberg (dalam Sugiyono, 2020: 115) membagi wawancara kedalam tiga tipe yakni:

- a. Wawancara terstruktur, dalam tipe wawancara ini, peneliti telah mengetahui informasi apa yang ingin didapatkan sehingga wawancara berpedoman penuh pada pedoman wawancara.
- b. Wawancara semiterstruktur, bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka yang bisa diperoleh dari hasil diskusi antara peneliti dan narasumber.
- c. Wawancara tidak berstruktur merupakan tipe yang sering digunakan dalam penelitian yang mendalam tentang suatu fenomena. Dalam tipe wawancara ini peneliti lebih banyak mendengarkan informasi yang diberikan

narasumber karena apa yang ingin diperoleh peneliti belum diketahui secara jelas dan pasti.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui wawancara terstruktur dengan beberapa pihak, yaitu Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan DLH Kota Semarang serta Pengurus dan Nasabah Bank Sampah “Aisah” dan “Mekar Jaya”.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen berfungsi sebagai sumber pelengkap observasi dan wawancara. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui metode studi dokumen dengan mengumpulkan berbagai informasi dari buku, artikel ilmiah, laporan kerja instansi terkait, dan media massa.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Ashar, 2019) analisis data adalah upaya untuk mengubah data yang diperoleh dari hasil penelitian menjadi data yang dapat dikelola. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020: 132) terdiri atas:

1. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui kajian pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi selama di lapangan.
2. Reduksi atau seleksi data. Informasi yang diperoleh peneliti umumnya cukup banyak sehingga perlu untuk dilakukan reduksi data dan hanya memilih hal-hal pokok. Penelitian ini mereduksi data yang diperoleh dari kedua bank sampah dengan menggunakan metode komparasi.

3. Penyajian data, yang disajikan dalam bentuk uraian dan tabel.
4. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari hasil perbandingan kinerja kedua bank sampah.

1.9.8. Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan adanya validitas dan reliabilitas data yang benar sehingga hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya. Salah satu cara menentukan kualitas data adalah dengan melakukan uji keabsahan data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiyono, 2020). Sugiyono (2020: 125-126) membagi teknik triangulasi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yakni teknik menguji kredibilitas data yang diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, yakni teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan melalui pengecekan data pada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yakni teknik menguji kredibilitas data dalam situasi atau waktu yang berbeda.

Keabsahan data dalam penelitian ini akan diuji dengan teknik triangulasi sumber dimana peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari masing-masing sumber untuk mengecek kebenaran data atau informasi.